

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di abad dua puluh ini, ilmu pengetahuan telah memberi kepada umat manusia berkah yang sangat melimpah. Salah satunya adalah memberi manusia akan kemudahan materi, dan memperluas horizon pemikirannya. Akan tetapi, pada sisi yang lain ilmu pengetahuan juga mendatangkan kegelisahan jiwa yang sangat hebat, dan semakin terkikisnya perhatian pada pedoman spritual dan etika "kebenaran dan keadilan" yang telah menjadi benteng kokoh setiap peradaban besar di masa lalu. Saat ini, hal-hal yang absolut tampaknya telah menjadi impian yang tidak bisa terwujud. Dunia kita sekarang ini adalah sebuah dunia relativitas yang baru dan asing. Penting bagi kita untuk menemukan sesuatu pengganti yang bermakna bagi kesadaran kita akan makna yang telah hilang.¹

Dalam kenyataannya, manusia pada saat ini hanyalah menjadi produk mesin sejarah yang membawa kebrutalan-kebrutalan yang tidak manusiawi. Manusia tidak lagi menempati posisinya sebagai subyek sejarah atau pusat gravitasi dari setiap dinamika yang terjadi di dunia ini.

Manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia selalu mempertanyakan akan perihal kebaikan dan keadilan. Sedang yang lainnya tidak menghiraukan akan keduanya. Apalagi bertanya, karena bagi keduanya (baca: tumbuhan dan binatang)

¹J. Donal Walters, *Crisis in Modern Thought* (Jakarta: Gramedia, 2003), 1.

satu-satunya alasan untuk tetap hidup di dunia ini hanyalah memenuhi kebutuhan *survival* belaka.

Dengan kata lain, manusia hidup di dunia ini tidak hanya bertugas untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan hidup semata (*survival*). Akan tetapi, manusia juga mempunyai tugas serta tanggungjawab untuk melaksanakan tugas sosialnya sebagai *khalifah* di muka bumi. Dengan demikian, dalam ruang kehidupannya manusia memerlukan landasan etis dalam berkreasi, dalam mengaktualisasikan pikiran dengan tindakan, serta relasinya dengan manusia yang lain.

Oleh karena itu, etika selalu dijadikan sebagai suatu bentuk reflektif-kritis atas moralitas yang nantinya menghasilkan berbagai macam bentuk pemikiran yang dikembangkan oleh beberapa filsuf. Perdebatan demi perdebatan tentang moralitas terus-menerus menghasilkan pemikiran baru yang terkadang merupakan antitesis maupun sekedar modifikasi dari pemikiran sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Franz Magnis Suseno bahwasanya etika bukan menjadi sumber tambahan bagi ajaran moral. Akan tetapi, etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan tentang moral.²

Etika³ berbeda halnya dengan ajaran moral. Etika merupakan cabang dari *aksiologi* (kajian filsafat tentang nilai) yang secara khusus membahas tentang

²Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 14.

³Istilah *Etika* berasal dari Bahasa Greek *ethikos* yang bermakna adat, karakter kebiasaan, cara dan sikap. Peter A. Angeles, *Dictionary of Philosophy* (New York: Barnes & Noble Book, 1931), 82. Lihat Dagobert D. Runes, *Dictionary of Philosophy*, (New Jersey: Littlefield & Adam Co., 1971), 98. sedangkan Franz Magnis Suseno membedakan antara etika dengan ajaran moral,

nilai-nilai baik dan buruk dalam pengertian sesuai dengan nilai kesusilaan atau tidak. Dalam pembahasan yang lebih detail, etika juga menyiratkan pada beberapa bias makna, misalnya ia bisa diartikan sebagai norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi pedoman atau pegangan seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya, semisal Etika Jawa, Etika Hindu, Etika Protestan dan lain sebagainya. Etika juga dimengerti sebagai sekumpulan asas-asas atau norma-norma yang biasa dikenal dengan istilah kode etik, seperti kode etik jurnalistik, kode etik kedokteran, kode etik pengacara, dan lain sebagainya.⁴

Sudah sejak dahulu kala manusia selalu mempertanyakan dua konsep yang selalu berimplikasi pada tindak-tanduk perilakunya, dua konsep tersebut yaitu kebaikan dan keadilan. melalui berbagai pengalaman yang dramatis para filsuf sedari dulu membahas dan menguraikan akan dua hal tersebut. Platon, misalnya, ia memperdebatkan konsep kebaikan dan keadilan dengan gurunya, Socrates. Baginya, persoalan kebaikan dan keadilan adalah menyangkut keseimbangan dan harmoni dalam dunia kehidupan. Sedangkan bagi Socrates, persoalan itu menyangkut pengetahuan dan pencapaian kebaikan (kebijaksanaan) bagi dirinya sendiri. Kebaikan dan keadilan masih dipahami sebagai etika kebijaksanaan dan keutamaan yang batasannya kabur dan tumpang tindih.

ajaran moral lansung mengajarkan bagaimana orang harus hidup. Ajaran moral adalah rumusan sistematis terhadap anggapan-anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban-kewajiban manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai dan ajaran moral. Etika tidak pertama-tama mau menjawab pertanyaan "bagaimana manusia harus hidup?", melainkan tentang cara rasional (dapat dipertanggungjawabkan di hadapan akal budi). Lihat, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 31.

⁴K. Berten, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4.

Perdebatan panjang tentang kebaikan dan keadilan membawa Aristoteles mengidealkan dengan kebahagiaan, ia mengemukakan bahwasanya kebahagiaan haruslah menjadi tujuan pada dirinya sendiri dan bukan hanya menjadi tujuan instrumental. Yaitu sebuah tujuan yang nantinya dapat tercapai apabila manusia menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan cara melalui akal budinya. Manusia akan mengalami kebahagiaan apabila menjalankan hidup secara berkeutamaan. Hidup berkeutamaan adalah sebuah proses kehidupan di mana manusia bisa mengatur perbuatannya sedemikian rupa, sehingga rasio akan selalu mengambil kendali atas insting-insting rendah yang sangat menyesatkan dirinya. Gagasan tentang kebahagiaan juga dikembangkan oleh seorang filsuf bernama Epikuros, ia berpandangan bahwasanya kebahagiaan akan tercapai apabila manusia mengumpulkan maksimum kenikmatan secara bijaksana.⁵

Pergeseran dramatik dalam mendefinisikan konsep kebaikan dan keadilan tersebut terlihat jelas dari pemahaman zaman modern yang mendefinisikan moral berdasarkan dan berangkat dari dalam diri manusia sendiri. Adalah Immanuel Kant yang membalik pandangan tentang apa yang baik dan adil dengan berangkat dari otonomi individu sebagai makhluk yang bebas dengan kehendaknya. Baginya, kebaikan moral adalah yang baik dari segala segi, tanpa pembatasan dan tidak bergantung dari sesuatu yang berada di luar dirinya.⁶ Kebaikan moral menurutnya, termanifestasikan dalam ‘kehendak baik’ yang tak lain adalah ‘kewajiban’. Kewajiban moral tidak dikarenakan oleh faktor-faktor dari luar melainkan ia

⁵Donny Gahral Adian, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), 118.

⁶Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 143.

wajib karena dirinya sendiri. Bukan karena faktor perintah Tuhan, ikatan tradisi, atau konsekuensi setelah kewajiban moral ditunaikan.⁷

Persoalan tentang modernisasi pada saat ini, telah membawa dampak pada permasalahan universal yang sedang dialami oleh berbagai masyarakat dewasa ini, termasuk Indonesia. yaitu, persoalan intergritas sosial dan solidaritas sosial di tengah pluralisme dan relativisme nilai-nilai. Dengan kata lain, erosi solidaritas sedang melanda kehidupan umat manusia di belahan dunia ini.

Menurut Umaruddin Masdar dkk, dalam buku "*Politik Wali Songo Dan Visi Kebangkitan Bangsa*", terdapat tiga rumpun masalah pokok yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara Indonesia, yaitu:⁸

Pertama, krisis eksistensi dalam politik internasional. Menurut analisa Michael Rowbotham, yang dijelaskan dalam buku "*Goodbye America, Debt and The Dollar Empire*", krisis ini terjadi pada hubungan antara bangsa yang satu dengan bangsa lain. Indonesia misalnya, Indonesia pada saat ini sedang mengalami degradasi peranan dalam segala sektor dan semakin lemahnya pertahanan diri, sehingga dengan mudahnya bangsa dan negara Indonesia mudah diintervensi oleh negara lain dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Salah satu hal yang menjadi kegagalan bangsa dan negara ini (baca: Indonesia) adalah gagalnya dalam mengimplementasikan atau menerjemahkan ideologi liberal-kapitalistik. Ideologi kapitalisme terbukti gagal karena secara faktual

⁷Fahrul Muzaqqi, "Menyoal Etika Dan Moral (Norma)", dalam E-Book Satu Tahun Situs Jarkom, www.jarkom.biz.

⁸ Umaruddin Masdar dkk, *Politik Wali Songo Dan Visi Kebangkitan Bangsa* (Yogyakarta: KLIK. R, 2006), 13-21.

perekonomian di kawasan Dunia ketiga termasuk Indonesia benar-benar carut marut, bahkan hancur. Kehancuran ini diakibatkan oleh model perampokan yang sistemik yang dilakukan oleh negara dan bangsa yang lebih maju. Dari perampokan tersebut mereka harus menanggung akibat yang berkelanjutan. Tidak berhenti di situ, negara-negara Dunia Ketiga tidak hanya dirampok secara material, melainkan juga bentuk kebudayaan mereka dihancurkan dengan aling-aling upaya untuk memberadabkan negara dan bangsa yang tidak beradab. Proses pembangunan yang diselewengkan dari asalnya bertujuan untuk melayani kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah proses pengambilalihan yang tidak kentara namun brutal.

Kedua, krisis ideologi. Sedari kemerdekaan Indonesia dideklarasikan, bangsa ini belum pernah mengalami proses ideologisasi yang seutuhnya, terlihat dalam maraknya gerakan yang berkeinginan untuk diberlakukannya syari'at Islam. Begitu juga dalam masalah ekonomi⁹ misalnya, di mana dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 baik yang asli maupun yang telah diamandemen, dijelaskan bahwasanya koperasi¹⁰ merupakan tiang penyangga utama ekonomi nasional. Akan tetapi, dalam realitasnya kebijakan pemerintah tidak pernah memberikan proteksi yang jelas kepada koperasi dan sektor usaha kecil dan

⁹Asas perekonomian Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 1 bahwasanya : "perekonomian Indonesia disusun sebagai bersama atas dasar asas kekeluargaan", artinya, posisi yang seimbang harus ditegakkan dalam hubungan antara pekerja dan pemodal yang kaitannya dengan hak-hak dasar, seperti upah/gaji yang layak, kesehatan, keselamatan kerja, serta pembagian *surplus* ekonomi (laba). Lih. Defiyan Cori, "Merekonstruksi Sistem Ekonomi Konstitusional; Catatan atas Kongres ISEI 2009", *Kompas*, (18 Agustus 2009), 38.

¹⁰Sejarah berdirinya koperasi dijadikan sebagai sintesis dari sistem kapitalisme dan komunisme yang cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi dan sosial orang perorang atau sekelompok orang saja.

menengah. Oleh karenanya, proses ideologisasi nasional harus dipahami ulang bukan sebagai *medium* pembenar atau hanya dijadikan sebagai alat legitimasi rezim politik yang sedang berkuasa. Akan tetapi, harus menjadi dataran bersama yang merekat, mempersatukan dan memberi tenaga pada gerakan politik yang merangkul, merengkuh dan memanfaatkan seluruh tenaga dan sumberdaya yang terkandung dalam batas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, krisis modernitas,¹¹ sebagai sebuah bangsa dan negara, Indonesia telah menjadi bangsa yang maju dengan tegaknya institusi-institusi modern serta kultur konsumeristiknya telah menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara lain dalam pergaulan dan percaturan dunia internasional.

Dalam realitas yang lain, masyarakat Indonesia pada spektrum tata nilai berada pada titik nadir peradaban. Moralitas politik, semangat kebangsaan dan kesantunan sosial telah menjadi barang langka di tengah gegap gempitanya reformasi politik dan ekonomi. Pada realitas ini, terdapat pemahaman yang keliru

¹¹Istilah "Modernitas" adalah kata sifat yang berasal dari kata *moderna* yang berarti baru, istilah ini memuat dua hal. Yaitu : *pertama*, konsep waktu (linear, teleologis, dan progresif). *Kedua*, bentuk kesadaran (subjek sebagai pusat dari realitas dan kritik). Sedangkan ciri-ciri masyarakat modern tercirikan atas tiga komponen subsistem. *Pertama*, subsistem birokrasi negara hukum (kuasa). *Kedua*, subsistem ekonomi kapitalis (uang). *Ketiga*, dunia kehidupan sosio kultural/*civil society* (solidaritas), F. Budi Hardiman, materi pelatihan "*History of Thought*", USC Satunama Yogyakarta, Selasa 17 Juli 2007. Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno masyarakat modern tercirikan dengan, adanya proses industrialisasi, industrialisasi menjadi darah daging masyarakat, karena industrialisasi menentukan bukan hanya dalam ekonomi belaka, akan tetapi, industrialisasi menjadi *way of life*-nya. *Kedua*, dengan adanya proses industrialisasi akan menghasilkan perubahan total dan amat mendalam terhadap gaya hidup manusianya. *Ketiga*, teknologi sebagai aplikasi sains menempatkan *homo faber* sebagai pusat sejarah. Teknologi dijadikan sebagai ilmu baru, yaitu ilmu yang secara khusus meneliti kekuatan alam dengan tujuan untuk memanfaatkannya bagi produksi industrial, dan akhirnya menciptakan masyarakat informasi. *Keempat*, tidak lagi mengalami ketergantungan dari alam. *Kelima*, terjadinya perubahan mendasar dalam cara berfikir manusia. Perubahan ini tercirikan dengan adanya proses diferensiasi antara masyarakat, alam dan realitas transenden yang terpahami sebagai realitas yang berbeda dan tidak ada sangkut pautnya antara yang satu dengan yang lain. Lih. Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 56-58.

dalam memahami proses modernisasi. Proses modernisasi hanya dipahami sebagai *life style* (gaya hidup), bukan sebagai *state of mind* (keadaan pikiran). Salah pemahaman akan modernisasi ini mengakibatkan masyarakat akan kehilangan olah batinnya, sedangkan pada masyarakat agama akan kehilangan olah jiwanya. Keduanya hanya menjadi penghias, komoditas sekaligus hanya menjadi alat legitimasi bagi sebuah rezim yang sedang berkuasa.¹²

Salah memahami modernitas ini juga mengakibatkan pada terciptanya krisis sosio-kultural, hal ini dapat kita saksikan dalam bentuk disorientasi dan dislokasi masyarakat. Misalnya, disintegrasi sosial-politik yang bersumber dari euforia kebebasan yang nyaris kebablasan, lenyapnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit. Sehingga masyarakat kita yang sedari dulu terkenal dengan kesantunannya akan sangat mudah marah dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarkhi, merosotnya penghargaan dan kepatuhan kepada hukum, etika, moral, kesantunan sosial, dan keadaban publik, dan pada akhirnya akan berlanjut pada terjadinya konflik kekerasan yang bernuansa politis, etnis, dan agama.

Adalah Jürgen Habermas, tokoh filsuf sekaligus sosiolog berpengaruh asal Universitas Frankfurt (Jerman), dengan konsep etika diskursusnya, ia berusaha untuk membalikkan konsep etika modern yang mencapai puncaknya pada era Immanuel Kant (1724-1804), yang memandang kebaikan dan keadilan karena tujuan atau konsekuensi yang ditimbulkan. Immanuel Kant (1724-1804)

¹²Hasyim Wahid, *Kompas*, 28 Mei 2000.

juga memperlihatkan bahwa hanya norma-norma yang dapat diuniversalisasikan yang dapat berlaku umum dan menjadi pendasaran dari ajaran moral.¹³

Kaitannya dengan konsep etika diskursus, Jürgen Habermas memulai dengan prinsip sebagai berikut :

bahwa yang boleh meng*claim* akan keabsahan hanyalah norma-norma yang disepakati (atau dapat disepakati) oleh semua orang yang bersangkutan sebagai partisipan sebuah diskursus praktis, semua kesepakatan sejati hanya dapat dicapai dalam sebuah diskursus yang bebas dan terbuka.¹⁴

Etika diskursus adalah kritik atas prinsip *imperatif kategoris* Immanuel Kant yang sangat monologis. Landasan etika Immanuel Kant berangkat dari pertanyaan tentang bagaimana moralitas dan kehendak bebas bisa ada dalam suatu dunia yang tunduk terhadap hukum-hukum ilmiah. Ia mempercayai bahwasanya manusia yang mampu memahami alasan-alasan untuk melakukan sesuatu atau tidak yang dapat dikenai penilaian moral atau amoral. Penilaian tentang baik dan buruk hanya berlaku pada makhluk yang rasional (baca : manusia), sebuah alasan akan dianggap valid secara universal bukan tergantung pada selera atau niat seseorang. Dengan kata lain, sesuatu dianggap benar jika mendapat persetujuan yang bersifat universal. Dengan pertimbangan ini, ia merumuskan *imperatif kategoris* sebagai aturan fundamental dari moralitas.¹⁵ Berbeda halnya dengan Jürgen Habermas, ia berpendapat tidak cukup jika hanya setiap individu saja yang berusaha untuk memeriksa terhadap ajaran moral yang bersifat universal tersebut. Akan tetapi, ajaran moral harus diperiksa melalui tahapan dialogis guna menyepakati terhadap

¹³Franz Magnis Suseno, *Etika Abad Kedua Puluh* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 234.

¹⁴*Ibid.*, 235-236.

¹⁵Bryan Magee, *The Story of Philosophy*, ter. Marcus Widodo, Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 132-135.

ajaran moral tersebut. Etika diskursus juga menuntut agar tindak komunikasi yang terjadi di dalam dunia-kehidupan tersebut nantinya dapat terhindar dari konflik serta mempunyai sifat emansipatoris. Yaitu membebaskan manusia dari belenggu lama menuju keadaan baru yang lebih bebas.¹⁶ Sebagaimana diuraikan oleh F. Budi Hardiman bahwa dalam etika diskursus orang berkomunikasi dengan berusaha mengambil sudut pandang orang ‘yang lain’ (intersubjektif) dengan memenuhi kompetensi komunikatif yang meliputi klaim tepat, benar, jujur dan komprehensif. Klaim ‘tepat’ mengacu pada kenyataan objektif yang ada (tidak ada memanipulasi), ‘benar’ terhadap norma-norma sosial yang berlaku pada saya; ‘jujur’ terhadap dunia batin dan ekspresi saya dan ‘komprehensibilitas’, bahwa tiga klaim itu telah terpenuhi semuanya.¹⁷

Oleh karena itu, dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sudah dari akarnya bersifat majemuk, beragam suku, ras dan agama, hidup serta berkembang bersama dalam membentuk realitas kolektif. Pada era globalisasi informasi dan komunikasi seperti saat ini, etika diskursus Jürgen Habermas menemukan relevansinya sebagai perangkat operatif dalam berkomunikasi dan digunakan dalam membentuk satu konsesi bersama. Karena pengandaian dari etika diskursus dalam memutuskan penilaian moral, menganjurkan untuk mengambil perspektif nyata dari setiap rekan bicara pada setiap wacana, dan berpegang teguh terhadap apa yang bisa dibenarkan dan dibangun secara rasional.

B. Rumusan Masalah

¹⁶Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action Vol. II : Lifeworld and System*, (Boston: Beacon Press, 1989), 138.

¹⁷F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), xxii.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat secara kritis pandangan Jürgen Habermas tentang etika, untuk lebih memudahkan memahami rumusan masalah dalam penelitian ini, kita ungkapkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep etika diskursus Jürgen Habermas?
2. Bagaimana relevansi etika diskursus Jürgen Habermas dalam konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia?

C. Penegasan Judul

Judul skripsi ini tersusun dari beberapa istilah yang pengertian-pengertiannya perlu didefinisikan untuk menjadi pedoman dan menghindari kerancuan dalam pembahasan lebih lanjut.

Ada beragam istilah yang perlu didefinisikan untuk keperluan operasionalnya, yaitu: *Pertama*, kata "etika diskursus" etika dalam pengertian etimologis berasal dari bahasa Yunani, *ethikos*, *ethos* (adat, kebiasaan, praktek).¹⁸ Sedangkan diskursus atau biasa dalam lingkungan bahasa kita disinonimkan dengan wacana adalah ucapan yang dengannya pembicara menyampaikan sesuatu tentang apa saja kepada pendengar. Sedangkan yang dimaksud dengan etika diskursus di sini adalah bukan sebuah pendasaran etika. Melainkan sebuah metode untuk memastikan kembali arti dari norma-norma moral yang dipertanyakan.

Kedua, Jürgen Habermas adalah satu dari sedikit filsuf dan teoritis ilmu sosial Eropa yang sangat terkemuka dan terkenal selama lebih dari tiga puluh tahun terakhir. Habermas merupakan tokoh dari generasi kedua Mazhab

¹⁸Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta : PT Gramedia, 2002), 217.

Frankfurt. Ia mendasari teorinya dengan bertolak dari teori kritis Masyarakat Max Horkheimer Theodor W. Adorno. Ia mengembangkan sebuah gagasan teori masyarakat yang bertujuan praktis, akan tetapi pada sisi yang lain, Ia juga melepaskan diri dari kedua tokoh tersebut (baca : Max Horkheimer Theodor W. Adorno), hal ini sangat jelas sekali bahwasanya ia tidak mengambil alih dari kecurigaan mereka terhadap ilmu-ilmu empiris sebagai wahana positivisme-afirmatif.¹⁹

Terakhir, Indonesia, yaitu suatu tempat hunian yang masyarakatnya terdiri dari beragam suku, ras dan agama.

Dengan uraian di atas dan untuk kepentingan penulisan skripsi ini, penulis berusaha mendeskripsikan tentang pemikiran etika diskursus secara konseptual dan menjawab tentang bagaimana relevansi etika diskursus dalam konteks masyarakat Indonesia. Baik melalui usaha yang bersifat langsung, maupun tidak langsung yang terdapat dalam karya Jürgen Habermas.

D. Alasan Memilih Judul

Di era global sekarang ini, banyak manusia yang memiliki kesamaan nilai dan materi di berbagai belahan negara di dunia ini. Dengan dibukanya kran-kran kebebasan sehingga euforia politik dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai akibatnya, muncul banyak perbedaan yang mengesankan adanya konflik kepentingan yang berimbas pada disintegrasi nasional.

¹⁹Franz Magnis Suseno, “75 Tahun Jürgen Habermas”, *Majalah Basis*, 11-12 (November-Desember, 2004), 4.

Dewasa ini, juga banyak orang yang ingin berjuang dalam rangka memperbaiki sistem sosial politik dan budaya di Indonesia. Keinginan tersebut seharusnya tidak dilakukan tanpa menghadirkan sifat kebencian dan kekerasan.

Mengetahui pemikiran Jürgen Habermas tentang etika memiliki arti penting bagi masyarakat Indonesia khususnya, dan masyarakat internasional pada umumnya. Karena pemikiran Jürgen Habermas memiliki perangkat metodologis dan praksis dalam ranah sosial. Untuk itu, penelitian tentang etika dengan mengambil konsep etika yang ditawarkan oleh Jürgen Habermas menemukan relevansinya. Adapun alasan Penulis memilih judul ini sebagai berikut :

1. Konsep etika Jürgen Habermas sejatinya menjadi basis dari tindakan komunikatif bagi manusia, sehingga ketika mereka bertemu dalam ranah-kehidupan (ruang publik), proses komunikasi yang dilakukan bebas dari kepentingan.
2. Pemikiran etika Jürgen Habermas layak untuk dikaji dan menemukan relevansinya dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda dengan beragam suku, agama, ras dan tentunya dengan beragam kepentingan yang mengitarinya.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan pokok penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari dan menemukan jawaban kualitatif-interpretatif berdasarkan sumber-sumber yang ada terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam dua butir rumusan masalah. Untuk lebih jelasnya, tujuan itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang deskripsi pemikiran etika Jürgen Habermas.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran etika Jürgen Habermas bagi masyarakat Indonesia.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Guna memberikan *khazanah* pemikiran bagi masyarakat akademis di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin khususnya, maupun masyarakat umum dalam memahami pemikiran etika Jürgen Habermas dan relevansinya bagi masyarakat Indonesia.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang kaitannya dengan pemikiran etika Jürgen Habermas.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan buku "*Etika Abad Kedua Puluh*" karya Franz Magnis Suseno yang diterbitkan oleh Kanisius sebagai buku kunci dalam fokus penelitian ini. Dan dalam buku tersebut tergambar secara jelas bagaimana sebenarnya pemikiran Jürgen Habermas tentang etika diskursus.

Dari hasil lacakan penulis, sebenarnya pemikiran Jürgen Habermas sudah banyak dibahas dalam beberapa buku. Diantaranya adalah F. Budi Hardiman, yang dianggap sebagai Juru Bicara (JUBIR) Jürgen Habermas di Indonesia. Dalam bukunya "*Kritik Ideologi; Menyingkap Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*", (Yogyakarta: Kanisius, 1991), sebuah karya skripsinya di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Ia memusatkan perhatiannya tentang tantangan yang

dihadapi oleh manusia dalam persoalan kemanusiaannya dalam bingkai filsafat pengetahuan Jürgen Habermas. Dalam hal ini penelitian F. Budi Hardiman hanya terpusat pada karya awal Jürgen Habermas pada tahun 70-an.

Dalam bukunya yang lain *"Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas"*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), ia mempunyai titik tekan yang sama dengan karya terdahulunya yaitu memperkenalkan pemikiran Jürgen Habermas di Indonesia, dengan memusatkan pada esai-esai Jürgen Habermas dalam rentang tahun 1960-an sampai 1980-an khususnya persoalan yang ada kaitannya dengan persoalan ilmu, masyarakat, politik dan filsafat dewasa ini.

Sedang karya terakhirnya adalah *"Demokrasi Deliberatif; Menimbang 'Negara Hukum' dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas"*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), dalam buku ini, F. Budi Hardiman berupaya menawarkan sebuah model demokrasi dan negara hukum pasca-Suharto dalam masyarakat kita (baca: Indonesia), model yang ditawarkannya adalah dikenal dengan istilah *"demokrasi deliberatif"* sebuah desakan guna membuka ruang-ruang dan kanal-kanal komunikasi politis dalam masyarakat kita yang sedang melakukan reformasi politik dan hukum dengan mempertimbangkan pluralitas orientasi etnis, religius dan politis. Pendasaran ini berangkat dari pemikiran Jürgen Habermas dalam bidang filsafat politik.

Ada juga buku *"Seri Tokoh Filsafat Jürgen Habermas"*, karya Ibrahim Ali Fauzi (Jakarta: Teraju, 2003) sebuah buku pengantar dalam memahami

pertualangan pemikiran filsafat Jürgen Habermas yang terkenal sangat rumit dan sarat akan acuan filosofis yang sangat mendalam.

Penulis juga menghadirkan buku-buku karya-karya asli dari Jürgen Habermas yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah: Jürgen Habermas, *Krisis Legitimasi*, ter. Yudi Santoso (Yogyakarta: Qalam, 2004) dan *Teori Tindakan Komunikatif Buku Satu dan Dua* yang telah diterbitkan oleh Kreasi Wacana.

Dari hasil amatan penulis, belum ada satupun skripsi yang mendeskripsikan pemikiran etika diskursus Jürgen Habermas secara konseptual dan bagaimana relevansinya dalam konteks masyarakat Indonesia. Karena skripsi yang penulis temukan diantaranya adalah:

Pertama, "Studi Epistemologi Jürgen Habermas mengenai Rasionalitas Ilmu sebagai Kekuatan Modernisme dan Implikasinya terhadap Praksis Pendidikan di Indonesia" yang telah dipertahankan penulisnya yaitu Imam Samroni pada jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP IKIP Yogyakarta (sekarang: UNY), 1994, yang berisi tentang tela'ah pendasaran epistemologis pengetahuan di dalam ruang modernitas, terutama kepentingan rasionalitas ilmu di dalam dan sebagai kekuatan modernisme itu sendiri. Studi pengetahuan kontemporer ini dilatari kritik-kritik radikal dari pascamodernisme dan holisme. Sehingga, dengan kejernihan inilah ditawarkan skema praksis pendidikan di Indonesia. Dengan melacak konteks "nalar modernitas" dalam tradisi Barat dari Weberian, Habermasian, posmo, juga kecenderungan holisme ilmu yang telah

menjadi kuasa pengetahuan. Ilmu yang tidak berbasis ilmiah dipinggirkan, bahkan di dalam wilayah penyelenggaraan pendidikan. Ilmu telah menjadi kriterium. Isu peningkatan kemampuan pembangunan, wacana kapasitas bangsa untuk belajar, konsep kekuatan pendidikan nasional yang telah menjadi bahasa-gaul pendidikan di Indonesia semakin memperjelas hal-ihwal ilmu sebagai kuasa yang selalu disambut gagap oleh para penyelenggara pendidikan. Dan selanjutnya adalah perlunya praksis pendidikan yang mengakomodasi kebudayaan (sebagai sistem pengetahuan) berdasar paradigma komunikasi Jürgen Habermas .

Kedua, "Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas Sebagai Rekonstruksi Ilmu Sosial", yang ditulis oleh Marfu'ah Sri Sanityastuti dan berhasil juga dipertahankannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada tahun 2009. Skripsi ini berisi tentang deskripsi teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas, yang nantinya dijadikan pendasaran baru dalam membangun epistemologi ilmu-ilmu sosial, hal ini berangkat dari perbedaan dalam metodologi ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial.

Ketiga, "Jürgen Habermas dan Hasan Hanafi; Kritik Terhadap Masyarakat Modern" ditulis oleh Muhammad Nukhan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005. Skripsi ini berisi tentang pemikiran Jürgen Habermas dan dikomparasikan dengan Hassan Hanafi tentang modernitas. Dalam pandangan Habermas, dia menyarankan agar kembali pada 'otensi' individu dalam dunia kehidupan dan realitas yang mengitarinya.

Sedangkan dalam amatan Hassan Hanafi ia menyarankan masyarakat modern yang mulai lupa akan jati dirinya agar kembali pada tauhid.

Keempat, "Resolusi Pertentangan Agama dan Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas" ditulis oleh Khalid Abdul Rahman, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2006. Skripsi ini berisi tentang pertentangan yang terjadi antara agama dan ilmu pengetahuan dianalisa dengan menggunakan teori tindakan Jürgen Habermas. Menurut penulis skripsi ini (baca: Khalid Abdul Rahman) terjadinya perbedaan diantara keduanya karena pendekatan yang dilakukan di antara keduanya berbeda, yang pertama (baca: ilmu pengetahuan) menggunakan materialisme ilmiah sedangkan yang kedua (baca: agama) menggunakan literalisme keagamaan. Selanjutnya juga dijelaskan bahwasanya teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas merupakan reaksi terhadap tindakan instrumental yang telah mereduksi terhadap kehidupan manusia yang di pandang pada sisi pekerjaan saja.

Kelima, "Demokrasi Deliberatif Kontribusi Untuk Negara Hukum Demokratis; Telaah atas Pemikiran Politik Jürgen Habermas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah " ditulis oleh Bambang Irawan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008. Skripsi ini berisi tentang, pemikiran Jürgen Habermas tentang demokrasi deliberatif dengan dianalisis dari segi *fiqh siyasah* (hukum tata negara Islam), di dalamnya penulis (baca: Bambang Irawan) berupaya untuk merekonstruksi proses komunikasi dalam konteks negara hukum demokratis. Hukum harus menjadi atau dihasilkan dari konsensus rasional. Dan

demokrasi bisa menjadi bagian dari sistem politik umat Islam apabila orientasi di dalamnya dan sistem nilainya harus diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.

Keenam, "Konsep Local genius pada Program Penyiaran Stasiun Televisi JTV (Analisis Teori Rasionalitas dan Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas)" ditulis oleh Syahirul Alim, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2009. Skripsi ini berisi tentang, penelitian peran media massa sebagai jembatan warisan budaya, penelitian yang ditulis lebih dikhususkan kepada konsep media massa PT. Jawa Pos yaitu media JTV, dengan menggunakan perangkat analisa teori rasionalitas dan tindakan Jürgen Habermas, hasil yang diperoleh adalah pelestarian budaya lokal yang diterapkan oleh stasiun teknis JTV searah dengan apa yang telah dicetuskan oleh Jürgen Habermas dalam teori rasionalitas dan tindakan komunikatif yaitu, membentuk sebuah komunikasi yang bertujuan untuk sebuah kesepakatan (konsensus) tanpa ada tujuan strategis dari salah satu pihak antara komunikator dan komunikan.

Sedangkan skripsi yang kami tulis, berisi tentang etika diskursus Jürgen Habermas secara konseptual, dan relevansi etika diskursus Jürgen Habermas dalam konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia yang sudah sedari dulu terdiri dari beragam suku, ras dan agama.

G. Metodologi Penelitian

Sebagai suatu analisis filosofis terhadap pemikiran tokoh, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan ini digunakan mengingat salah satu jenis penelitian sejarah

adalah penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran, ide-ide serta pembentukan watak tokoh tersebut selama hidupnya.²⁰

Sedangkan metode yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian kepustakaan (*library research*)²¹ dengan membaca karya-karya Jürgen Habermas (sebagai sumber primer) dan buku-buku yang membahas pemikiran Jürgen Habermas (sebagai sumber sekunder). Selain itu data-data juga dihimpun melalui buku-buku umum, seperti etika dasar, ensiklopedi, dan kamus filsafat. Begitu juga buku-buku sistematis dan tematis yang ada hubungannya dengan pemikiran Jürgen Habermas tentang etika.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan *critical discourse analysis* (analisa wacana kritis), yaitu melihat wacana, pemakaian bahasa dalam tuturan tulisan sebagai bentuk dalam praktik sosial.²² Maksudnya disini diperlukan adanya analisa kritis terhadap konsepsi wacana etika diskursus menurut Jürgen Habermas yang terpahami sebagai konsep etika dalam ranah publik dan relevansinya dalam masyarakat Indonesia yang *pluralis* dan *multikultur*.

Guna menggapai ketajaman analisis, metode Analisa Wacana Kritis dengan didukung oleh penggunaan metode *deskriptif-historis*. Metode deskriptif merupakan proses pencarian fakta dengan ketepatan interpretasi.²³ Kegunaan

²⁰Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), s62.

²¹Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 63.

²²Eriyanto, *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*, cet. Ke-II (Yogyakarta: LKiS, 2003), 7.

²³ Nazir, *Metode Penelitian...* 63.

deskripsi ini untuk menjelaskan bahwa suatu fakta, dalam hal ini berupa pemikiran itu benar atau salah.²⁴ Sedangkan analisa historis difungsikan guna mendapat keterangan mendalam tentang pengertian dan pengetahuan mengenai substansi dan sebab-sebab terjadinya peristiwa.²⁵ Kajian historis di sini lebih tertuju kepada pada pengembaraan (kehidupan) intelektual Jürgen Habermas, konteks sosial yang mempengaruhinya dan aneka ragam pemikiran yang mengkonstruksi pada konsep etika diskursusnya.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan memilih judul, penegasan judul, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengurai tentang biografi Jürgen Habermas yang terdiri dari dua sub bab yang meliputi perjalanan hidup Jürgen Habermas, meliputi latar belakang keluarga, pendidikan, karya-karya pengabdian dan ketokohnya. Sub bab kedua membahas tentang latar belakang pemikirannya, agar dari dua sub bab ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang Jürgen Habermas dan latar belakang pemikirannya.

²⁴Jujun S. Sumantri, *Ilmu Dalam Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1987), 77.

²⁵Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, cet. Ke-III, (Yogyakarta: Penerbit Firdaus, 2001), 3.

Bab ketiga berisi tentang kilas balik sejarah pemikiran tentang etika, yang meliputi pengertian dan fungsi etika, pemikiran etika pada zaman Yunani, pemikiran etika pada Abad Pertengahan, pemikiran etika pada Zaman Modern sampai pada etika diskursus Jürgen Habermas .

Bab keempat berisi tentang analisa data, yaitu posisi Jürgen Habermas, analisis terhadap sosio-kultural masyarakat Indonesia dengan mendialogkan pemikiran etika diskursus Jürgen Habermas dalam bingkai sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Bab kelima berisi penutup yang diharapkan kepada penyampaian akhir dari data-data yang telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya guna menjawab fokus kajian yang telah ditentukan dalam penelitian skripsi ini.